BUPATI DAIRI

P E N G U M U M A N
Nomor: 800/0369

TENTANG
PERSYARATAN, TATA CARA DAN JADWAL PEMBERKASAN UNTUK PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU SELEKSI KOMPETENSI I DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2021

I. DASAR

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 689 Tahun 2021 tanggal 21 April 2021, tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021, Tenaga Guru sejumlah : 941 orang.
2. Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Nomor : 810/3962 tanggal 30 Juni 2021 tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021.
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ;
4. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 14082/B-P.01.01/SD/D/2021 tanggal 02 November 2021 perihal Usul Penetapan NI PPPK Tahun 2021 secara elektronik ;
5. Pengumuman Bupati Dairi Nomor : 800/7104 tanggal 12 Nopember 2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi I pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021.
6. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 19456/B-MP.01.02/SD/D/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Penyelesaian Penetapan NI PPPK Guru Tahun 2021 secara elektronik

II. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERKASAN

Peserta yang lulus pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Seleksi Kompetensi I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Pengumuman Bupati Dairi Nomor: 800/7104 tanggal 12 Nopember 2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi I pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021 agar segera melakukan tahapan pemberkasan dengan cara sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan **LULUS** agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) melalui **https://sscasn.bkn.go.id**
2. Peserta yang dinyatakan **LULUS** agar segera melakukan pemberkasan untuk pengusulan NI PPPK mengacu pada Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagai berikut :
   a. Surat lamaran permohonan yang ditujukan kepada Bupati Dairi untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2021 ditulis tangan dengan huruf kapital dan tinta hitam di atas kertas F4 bermaterai Rp. 10.000,- (***terlampir***);
   b. Pas photo terbaru pakaian formal dengan **latar belakang berwarna merah** ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar beserta softcopy format file (jpg/jpeg. ukuran min-100kb, max-3MB) dengan nama file: FOTOP3K_NOMOR PESERTA;
   (contoh : FOTOP3K_23302021234598760)
   c. Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang/berkompeten dan dicap/stempel asli/basah (sesuai Anak Lampiran I-a dan I-b Keputusan Kepala BKN No 11 Tahun 2002 beserta softcopy scan ijazah asli format file (pdf, ukuran Max-3MB) dengan nama file: IJZPEND_NOMOR PESERTA ;
   (contoh : IJZPEND_23302021234598760)

d. Transkrip nilai yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang/berkompeten dan dicap/stempel asli/basah (sesuai Anak Lampiran I-a dan I-b Keputusan Kepala BKN No 11 Tahun 2002 beserta softcopy scan Transkrip Nilai Asli format file (pdf, ukuran Max-3MB) dengan nama file: TRNILAI_NOMOR PESERTA;
(contoh : TRNILAI_23302021234598760)

e. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang ditulis tangan dengan huruf kapital menggunakan tinta hitam dan telah ditandatangani oleh yang bersangkutan yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sesuai Anak Lampiran III Peraturan Kepala BKN No 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (contoh terlampir), beserta softcopy dengan format file : (.pdf, ukuran Max-3MB) dengan nama file : DRH_NOMOR PESERTA;
(contoh : DRH_23302021234598760)

f. Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai dengan anak lampiran IV Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditandatangani dan **bermaterai 10.000,-** beserta softcopy, format file: (pdf, ukuran Max-3MB) dengan nama file : SP5P_NOMOR PESERTA ;
(contoh : SP5P_23302021234598760)

g. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta softcopy, format file: (pdf, ukuran Max-3MB) dengan nama file : SKCK_NOMOR PESERTA.
(contoh : SKCK_23302021234598760)

h. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter yang berstatus PNS yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah beserta softcopy, format file : (pdf, ukuran Max-3MB) dengan nama file: SKETSEHAT_NOMOR PESERTA.
(contoh : SKETSEHAT_23302021234598760)

i. Asli Surat Keterangan Tidak Mengkonsumsi/Mengunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya, yang ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS dan bekerja di Rumah Sakit Pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberi kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud beserta softcopy, format file : (pdf, ukuran Max-3MB) dengan nama file: SKETNAPZA_NOMOR PESERTA.
(contoh : SKETNAPZA_23302021234598760)

j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan Perekaman E-KTP yang telah disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan berkompeten dan dicap/stempel asli/basah (Untuk KTP elektronik tidak perlu dilegalisir)

k. Fotokopi Kartu Keluarga dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yang telah disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan berkompeten dan dicap/stempel asli/basah (bila Kartu Keluarga telah menggunakan tanda tangan elektronik/barcode, maka tidak perlu dilegalisir).

l. Ketentuan Softcopy Dokumen :
   - Semua dokumen harus di Scan melalui proses alat pindai/mesin scanner, (tidak difoto dengan camera/handphone atau alat camera lainnya);
   - Scan berwarna atau sesuai dengan dokumen asli;
   - Tidak terpotong/utuh dan sesuai dengan dokumen asli;
   - Bisa dilihat dan dibaca dengan jelas;
   - Untuk mempermudah pengelolaan data, semua hasil scan yang telah disusun format .pdf, dan format .jpg/jpeg agar disatukan kedalam bentuk file folder dengan nama file : NAMA AWAL PESERTA_NAMA SINGKAT SEKOLAH_NOMOR PESERTA.
     (contoh: *TOGAR*_SMPN1SIDIKALANG_23302021234598760)

III. JADWAL PEMBERKASAN

Untuk penyerahan berkas usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) disampaikan ke **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Sidikalang (pada hari dan jam kerja)** mulai tanggal **10 Januari s/d 17 Januari 2022**, dengan hard copy dimasukkan dalam Map warna kuning dan soft copy dimasukkan ke dalam flasdisk.

IV. KETENTUAN LAINNYA

- Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi pemberkasan ulang akan diusulkan untuk proses penerbitan Nomor Induk PPPK (NI PPPK) dan penetapan Surat Keputusan Bupati Dairi tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- Peserta dinyatakan gugur apabila :
  - Dinyatakan tidak sehat jasmani/ rohani;
  - Terbukti mengkonsumsi narkotika/psikotropika/prekursor dan zat adiktif lainnya;
  - Tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
  - Apabila dikemudian hari peserta terbukti melakukan pemalsuan data/dokumen yang dipergunakan untuk keperluan pendaftaran sampai pemberkasan pengusulan NI PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Dairi dapat membatalkan/menggugurkan kelulusan peserta tersebut.
- Kami mohon agar seluruh peserta dapat melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan dengan sebaik-baiknya, sehingga proses penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK) dapat berjalan dengan lancar.
- Segala pengumuman yang berkaitan dengan Pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Seleksi Kompetensi I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2021 dapat dilihat melalui: www.dairikab.go.id
- Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI DAIRI

Dr. EDDY KELENG ATE BERUTU

Sidikalang,

Kepada
Yth. BUPATI DAIRI

di –
Sidikalang

Perihal : Permohonan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Pengumuman Bapak Bupati Dairi Nomor : ……, tanggal …… 2021 Tentang Hail Seleksi Kompetensi I Pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	: *(sesuai Ijazah dan menggunakan huruf kapital)*
N I K	: *(Nomor Induk Kependudukan, sesuai KTP)*
Tempat/Tanggal lahir	: *(sesuai Ijazah dan menggunakan huruf kapital)*
Jenis kelamin	: Pria / Wanita
Agama	: ……
Pendidikan / Jurusan	: *(sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan)*
Alamat lengkap (sesuai KTP)	: Jl. ……
	Desa/Kelurahan : ……
	Kecamatan : ……
	Kab./Kota : ……
	Provinsi : ……
	Kode Pos : ……
No. Telp/HP.	: ……
E-mail	: ……

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat kiranya diangkat menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2021 sebagai …… *(**nama jabatan**)*, dengan kualifikasi pendidikan …… *(**kualifikasi pendidikan yang dimiliki**)*.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini turut saya lampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi sebagai berikut :

a. Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir terbaru oleh Pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
b. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
c. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai serta telah ditempel pas foto ukuran 3 x 4 cm (sesuai anak lampiran 3 Peraturan BKN Nomor : 14 Tahun 2018 tanggal 27 September 2018) sebanyak 1 (satu) set;
d. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari POLRI;
e. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah;
f. Asli Surat Keterangan Tidak Mengkomsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekusor dan zat adiktif lainnya dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah ;
g. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai (sesuai anak lampiran IV Peraturan BKN Nomor : 1 Tahun 2019 tanggal 13 Pebruari 2019) yang berisi tentang :
   - Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
   - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri, PPPK atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Swasta;
   - Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri, PPPK atau Anggota TNI/Polri;
   - Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
   - Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
h. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir pejabat yang berwenang, sebanyak 1 (satu) lembar.

Demikian permohonan ini saya ajukan dengan harapan semoga Bapak dapat mempertimbangkannya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Materai
Rp. 10.000

……

ANAK LAMPIRAN 1-a
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

PEJABAT YANG BERWENANG
MENGESAHKAN FOTO COPY IJAZAH / STTB

NO	JENJANG PENDIDIKAN	YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI IJAZAH ASLI	YANG MENGESAHKAN MELEGALISIR FOTO COPY
1	*2*	*3*	*4*
1	SD, SLTP, SMU, SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN/KABAG/KABID/ KASUBDIN ATAU YANG SETINGKAT DAN BERKOMPETEN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KAB/ KOTA
2	UNIVERSITAS / INSTITUT	REKTOR DAN DEKAN	REKTOR / DEKAN / PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3	SEKOLAH TINGGI	KETUA DAN PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK	KETUA / PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4	AKADEMI POLITEKNIK	DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK	DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5	PT AGAMA ISLAM	PIMPINAN KOPERTIS	PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA KOPERTIS
6	PTS AGAMA HINDU/BUDHA/ KRISTEN/KATOLIK	KETUA/DIREKTUR URUSAN DAN DIREKTUR BIMAS URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA / KAKANDEP AGAMA KAB KOTA DAN DIREKTUR. SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN
7	SEKOLAH /AKADEMI/PT. KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH / AKADEMI / PT. KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH/KETUA/ DIREKTUR AKADEMI ATAU PT. YANG BERSANGKUTAN. KAPUSDIKLAT/ KABID YANG BERKOMPETEN

ANAK LAMPIRAN 1-b
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 11 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBUAT DAN MENGESAHKAN
SURAT KETERANGAN SEBAGAI PENGGANTI/RALAT IJAZAH/STTB/YANG
HILANG/RUSAK/
TERDAPAT KESALAHAN

NO	PENDIDIKAN	YANG MEMBUAT DAN MENANDATANGANI	YANG MENGESAHKAN/MELEGALISIR FOTO COPY
1	*2*	*3*	*4*
1	SD, SLTP, SMU, SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	KEPALA BAGIAN/KABID/KASUBDIN/ YANG BERKOMPETEN ATAU YANG SETINGKAT PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KABUPATEN/KOTA
2	UNIVERSITAS/ INSTITUTE	PIMPINAN UNIVERSITAS/INSTITUT YANG BERSANGKUTAN	DEKAN/PEMBANTU DEKAN BIDANGAKADEMIK
3	SEKOLAH TINGGI	PIMPINAN SEKOLAH TINGGI YANG BERSANGKUTAN	KETUA/PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4	AKADEMIK DAN POLITEKNIK	PIMPINAN AKADEMI DAN POLITEKNIK YANG BERSNGKUTAN	DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5	PTS AGAMA ISLAM	REKTOR/KETUA/ DIREKTUR/DEKAN	PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA KOPERTIS
6	PTS AGAMA HINDU/BUDHA/ KRISTEN/ KATHOLIK	REKTOR/DEKAN/KETUA/ DIREKTUR BIMAS/URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA/KAKANDEP AGAMA KAB/KOTA DAN DIREKTUR. SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN
7	SEKOLAH/AKADEMI/PT KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH/AKADEMI/ PT KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH /KETUA/DIREKTUR AKADEMI ATAU PT YANG BERSANGKUTAN KAPUSDIKLAT/KABID YANG BERKOMPETEN

ANAK LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 13 PEBRUARI 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pas Photo
berwarna
3 x 4 cm

I. KETERANGAN PERORANGAN

1	Nomor Induk Kependudukan (NIK)		
2	Nama ***)**		
3	Kabupaten/Kota Tempat Lahir ***)**		
4	Tanggal Lahir ***)**		
5	Jenis Kelamin		
6	Agama/Aliran Kepercayaan		
7	Status Perkawinan		
8	*E-mail*		
9	Nomor Telepon/Handphone		
10	Alamat	a. Jalan	
		b. Kelurahan/Desa	
		c. Kecamatan	
		d. abupaten/Kota	
		e. Propinsi	
9	Keterangan Badan	a. Tinggi (cm)	
		b. Berat badan (kg)	
		c. Rambut	
		d. Bentuk muka	
		e. Warna kulit	
		f. Ciri-ciri khas	
		g. Cacat tubuh	
10	Kegemaran (Hobby)		

*) Ditulis dengan huruf Kapital/Balok dan Tinta Hitam

II. PENDIDIKAN

1. Pendidikan di Dalam dan Luar Negeri

No	Tingkat	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Akreditasi	Tempat	STTB/Ijazah			Gelar	
					Nomor	Tanggal	Pejabat Penandatangan	Depan	Belakang
1	SD								
2	SLTP								
3	SLTA								
4	D.I								
5	D.II								
6	D.III/ AKADEMI								
7	D.IV								
8	S.1								
9	S.2								
10	S.3								

2. Kursus/Latihan di Dalam dan Luar Negeri

No	Nama Kursus/Latihan	Lamanya		Nomor	Tempat	Institusi Penyelenggara
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Riwayat Kepangkatan Golongan Ruang Penggajian

No	Instansi/Perusahaan	Jabatan	Masa Kerja		Gaji Pokok	Surat Keputusan		
			Tanggal Mulai	Tanggal Selesai		Nomor	Tanggal	Pejabat Penandatangan

IV. TANDA JASA/PENGHARGAAN

No	Nama Bintang /Lencana Penghargaan	Surat Keputusan		Tahun Perolehan	Nama Negara/Instansi yang memberikan
		Nomor	Tanggal		

V. RIWAYAT KELUARGA

1. Isteri/Suami

No	NIK	NIP **)	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Posisi Jabatan	Perusahaan/ Institusi	Status Perkawinan	Akte Nikah/Akte Cerai/Akte Meninggal	Tanggal Menikah/Cerai/ Meninggal	Status Hidup

2. Anak

No	NIK	NIP **)	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan/Posisi Jabatan	Perusahaan/ Institusi	Status Hidup

3. Orang tua kandung

No	NIK	NIP **)	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan/Posisi Jabatan	Perusahaan/ Institusi	Status Hidup

4. Saudara kandung

No	NIK	NIP **)	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan/Posisi Jabatan	Perusahaan/ Institusi	Status Perkawinan	Status Hidup

5. Bapak/Ibu Mertua

No	NIK	NIP **)	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan/Posisi Jabatan	Perusahaan/ Institusi	Status Perkawinan	Status Hidup

VI. KETERANGAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Jabatan Organisasi	Masa Kerja		Tempat	Pemimpin Organisasi
			Tanggal Mulai	Tanggal Selesai		

VII. KETERANGAN LAIN-LAIN

No	Nama Keterangan	Surat Keterangan		
		Nomor	Tanggal	Pejabat
1	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)			
2	Surat Keterangan Sehat (Jasmani dan Rohani)			
3	Surat Keterangan Bebas Napza (Psikotropika)			
4	Keterangan lain yang dianggap perlu			

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

……,…… 2022

Yang membuat pernyataan

MATERAI
10.000,-

……

1. Pada bagian *) Harus ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan hurup Kapital/balok dan tinta hitam.
2. Pada bagian **) diisi hanya jika CPNS/PNS/Pensiunan PNS.

ANAK LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 13 PEBRUARI 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

……,……2022

Yang membuat pernyataan

MATERAI
10.000,-

……